

COVID-19, KELOMPOK RENTAN, DAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA

Yanu Endar Prasetyo
Rinto Andhi Suncoko
Ria Yulianti
Hamong Santono
Dini Andria
Maria Anik
Dwi Premadha Lestari



Disampaikan dalam kegiatan peer-review draft laporan, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10 WIB (virtual)

01

PENDAHULUAN

02

**KEBIJAKAN & PROGRAM BANSOS
DI INDONESIA**

03

**PERMASALAHAN BANSOS DI
INDONESIA**

04

**IMPLEMENTASI BANSOS UNTUK
KELOMPOK RENTAN**

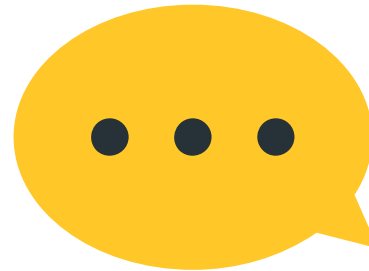
05

**PERAN ORGANISASI
MASYARAKAT SIPIL (OMS)**

06

KESIMPULAN

DAFTAR ISI





01.

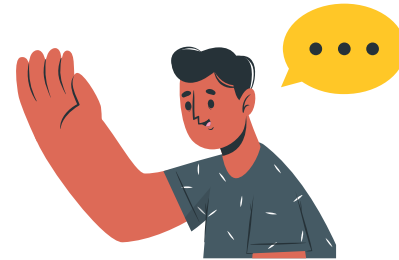
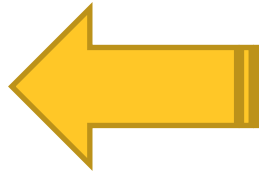
PENDAHULUAN

BANSOS DI ERA PANDEMI COVID-19



DAMPAK PANDEMI

Kematian, Kesehatan Mental (Stress & Depresi), Fasilitas dan Layanan Kesehatan Kolaps, Kekerasan dalam rumah tangga meningkat, usaha kecil kolaps, Pengangguran dan Kemiskinan meningkat, Resesi Ekonomi, dll.



PENANGANAN PANDEMI

Satgas Khusus COVID-19, *testing, tracing*, vaksinasi, pembatasan Sosial, Refocusing Anggaran, PEN, *Work from Home (WFH)*, **Bansos** untuk masyarakat yang membutuhkan, dll.

“

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial

(UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial)

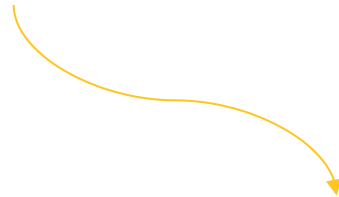
“

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

“

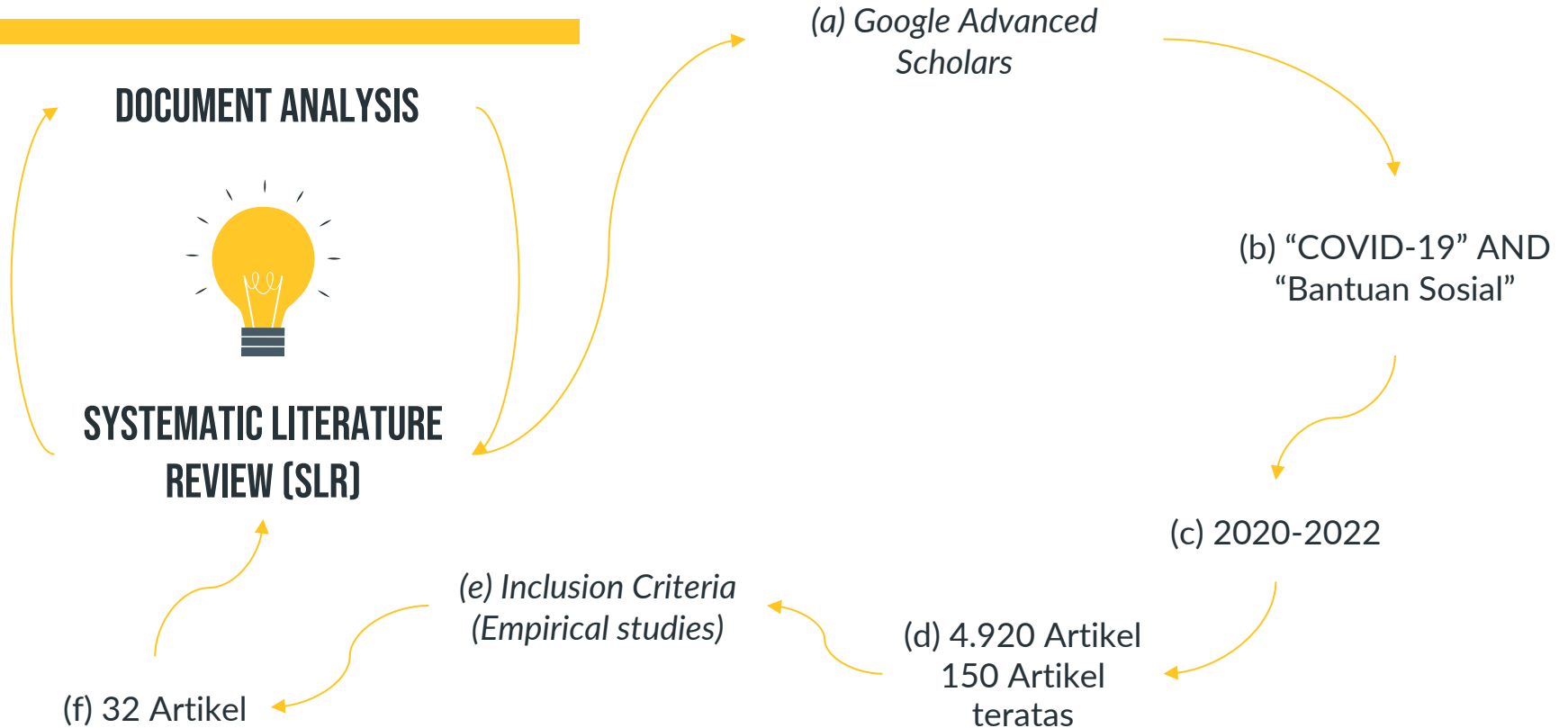
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar **Rp 203,9 T** untuk program **perlindungan sosial** dan Rp. 1,3 T untuk insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Sayangnya, laporan terbaru BPK tahun 2022 menunjukkan penyaluran **Bansos masih belum sesuai ketentuan dan menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp. 6,93 Triliun.**



Ada Apa Dengan Bansos?

METODOLOGI





02.

**KEBIJAKAN &
PROGRAM BANSOS
DI INDONESIA**

RAGAM BANSOS SELAMA PANDEMI (1)

| No | Bansos | Penerima | Besaran | <i>Delivery dan Durasi</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Program Keluarga Harapan (PKH) | Ibu Hamil | Rp. 3 juta/tahun | Per 3 bulan |
| | | Anak Usia Dini | Rp. 3 juta/tahun | Per 3 bulan |
| | | Anak SD | Rp. 900 ribu/tahun | Per 3 bulan |
| | | Anak SMP | Rp. 1,5 juta/tahun | Per 3 bulan |
| | | Anak SMA | Rp. 2 juta/tahun | Per 3 bulan |
| | | Disabilitas berat | Rp. 2,4 juta/tahun | Per 3 bulan |
| | | Lansia | Rp. 1,4 juta/tahun | Per 3 bulan |
| <i>Total penerima manfaat PKH sebanyak 10 juta KPM dengan total anggaran Rp. 2,7 T</i> | | | | |

RAGAM BANSOS SELAMA PANDEMI (2)

| No | Bansos | Penerima | Besaran | Delivery dan Durasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Keluarga Miskin yang terdaftar di DTKS | Rp. 200 rb/bulan atau Rp. 2,4 juta/tahun | Per bulan selama 12 bulan |
| <i>Total penerima manfaat BPNT sebanyak 18,8 juta KPM dengan total anggaran Rp. 45,2 T</i> | | | | |
| 3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) | Keluarga miskin di Desa non KPM PKH, BPNT dan Pra Kerja | Rp. 300 rb/bulan atau Rp. 3,6 juta/tahun | Per bulan selama 12 bulan |
| <i>Realisasi penerima manfaat BLT-DD sebanyak 406.788 KPM dengan total anggaran Rp. 3,84 T</i> | | | | |
| 4 | Bansos Tunai Non Jabodetabek/Bansos Tunai Presiden | KPM di luar Jabodetabek, non PKH dan BPNT | Rp. 600 ribu/bulan atau Rp. 1,8 Juta/tiga bulan | Per bulan selama tiga bulan |
| <i>Realisasi mencapai Rp 27,17 T (84%) dari total anggaran Rp 32,4 T untuk 9,18 juta KPM</i> | | | | |

RAGAM BANSOS SELAMA PANDEMI (3)

| No | Bansos | Penerima | Besaran | Delivery dan Durasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5 | Bansos Sembako Jabodetabek | KPM non PKH dan BPNT | Rp. 600 ribu/bulan dalam bentuk sembako | Per dua minggu |
| <i>Bansos Sembako berubah menjadi BST per 1 Januari 2021</i> | | | | |
| 6 | Diskon biaya listrik | Pelanggan listrik 450 VA | Pembebasan biaya abonemen/beban 50% | Per bulan |
| | | Pelanggan listrik 900 VA | Pembebasan biaya abonemen/beban 25% | Per bulan |
| <i>Realisasi anggaran semester I tahun 2021 mencapai Rp 6,75 triliun untuk 32,90 juta pelanggan</i> | | | | |
| 7 | Kartu Pra Kerja | WNI, 18 tahun, Pencari kerja, korban PHK, tidak sedang mengikuti pendidikan formal | Biaya pelatihan Rp. 1 juta dan insentif pasca pelatihan Rp. 2,4 juta/empat bulan | Per bulan selama 4 bulan |
| <i>Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, sudah ada sekitar 11,4 juta orang yang menjadi Penerima Kartu Prakerja dengan anggaran sebesar Rp. 20 T (2020) dan Rp. 21,2 T (2021).</i> | | | | |

RAGAM BANSOS SELAMA PANDEMI (4)

| No | Bansos | Penerima | Besaran | Delivery dan Durasi |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8 | Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji | Pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta (2020) | Rp. 2,4 juta/empat bulan atau Rp. 600 ribu/bulan | Per bulan selama 4 bulan |
| | | Pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta (2021) | Rp. 1 juta/dua bulan atau Rp. 500 rb/bulan | Per bulan selama 2 bulan |
| <i>Sejauh ini, sudah 6,6 juta pekerja yang menerima manfaat dari program ini</i> | | | | |
| 9 | Insentif Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | MBR maksimal penghasilan 8 juta/bulan (atau 8,5 juta/bln di Papua dan Papua Barat) | Keringanan Subsidi Selisih Bunga (SSB) 5%/tahun atau 4%/tahun di Papua dan Papua Barat | 10 tahun |
| | | | Keringanan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp. 4 juta atau Rp. 10 juta/tahun di Papua dan Papua Barat | |
| <i>Total anggaran yang digelontorkan untuk subsidi ini sebesar Rp 1,5 triliun</i> | | | | |

RAGAM BANSOS SELAMA PANDEMI (5)

| No | Bansos | Penerima | Besaran | Delivery dan Durasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 | BLT UMKM | Pelaku UMKM <i>unbankable</i> , non ASN/TNI/POLRI/BUMN/ BUMD | Rp. 2,4 Juta/tahun (2020) Rp. 1,2 Juta/tahun (2021) | Empat kali pembayaran |
| <i>Program ini ditargetkan bagi 12 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia</i> | | | | |
| 11 | Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) | Pengusaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, Diusulkan dinas Kop UMKM | Rp. 1,2 juta/umkm | Satu kali (langsung) |
| <i>Pemerintah menyiapkan dana BPUM sebesar Rp15,3 triliun untuk diberikan kepada 9,8 juta pelaku usaha (2021)</i> | | | | |

Bansos lainnya:

Pembebasan PPh Final 0,5%, Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit UMKM, Pembebasan Pembayaran Bunga dan Pokok KUR.

03.

**PERMASALAHAN
BANSOS DI
INDONESIA**

Tepat waktu?

Tepat jumlah?

Tepat sasaran?

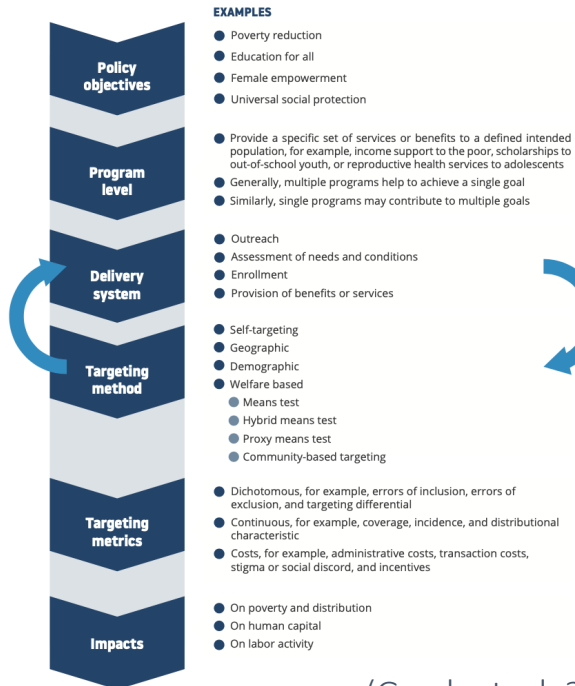
Tepat mutu?

Tepat administrasi?



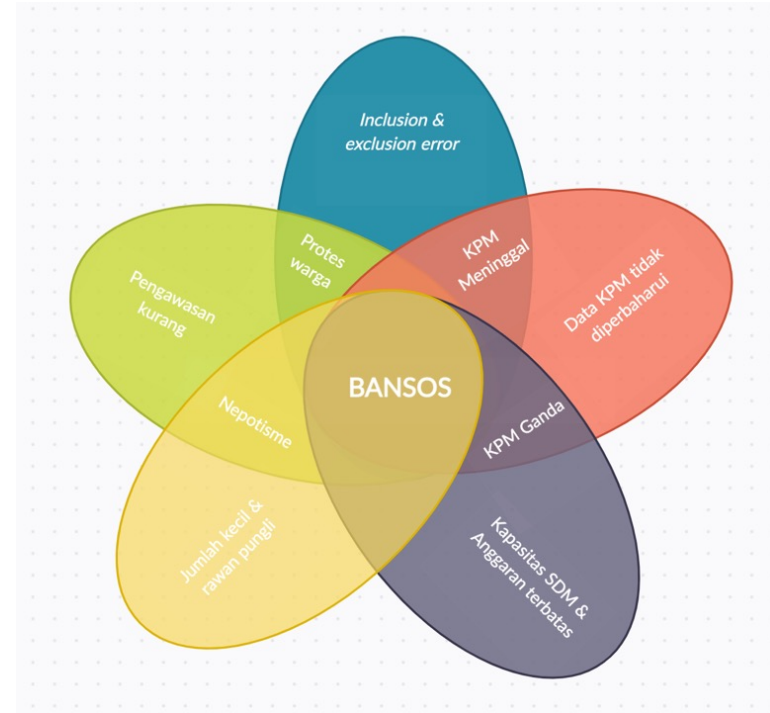
PERMASALAHAN “KLASIK” BANSOS DI INDONESIA (1)

Figure O.1 Hierarchy of Action



Source: Original compilation for this publication.

(Grosh et al., 2022)



Gambar 1. Hasil identifikasi dan klasifikasi permasalahan Bansos melalui *Systematic Literature Review* (SLR)

PERMASALAHAN “KLASIK” BANSOS DI INDONESIA (2)

KETERSEDIAAN & AKURASI DATA

- Data Kependudukan
- Data Penerima Manfaat Bansos
- Satu Data Indonesia

MASALAH PROGRAM DAN REGULASI

Sedikitnya terdapat 89 program dengan kode akun 57 (bantuan sosial), akun 52 (bantuan pemerintah), dan akun 99 (subsidi) yang digolongkan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu dan tersebar di banyak K/L.



MASALAH TEKNIS & NON-TEKNIS LAINNYA

- Keluarga KPM tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020.
- KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021.
- KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid.
- KPM yang dilaporkan meninggal dan KPM bansos ganda.

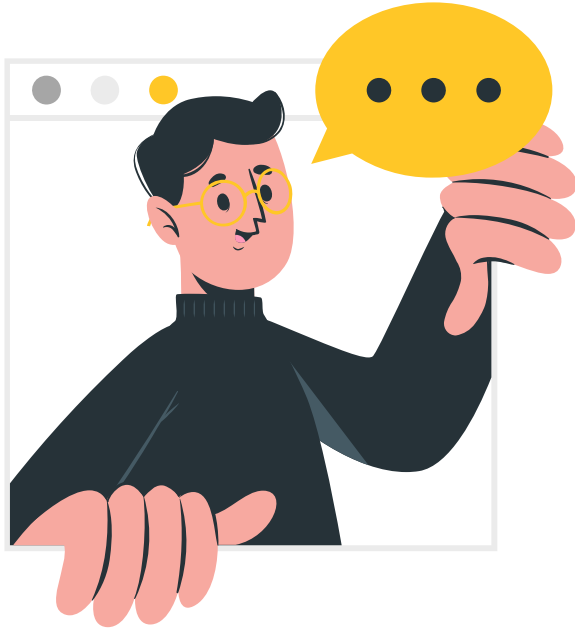


04.

**IMPLEMENTASI
BANSOS UNTUK
KELOMPOK RENTAN**

RUMAH TANGGA MISKIN

Kriteria RTM BPS & Kemensos (lama) : 14 Kriteria
Kriteria RTM Kemensos (Baru): 9 kriteria/syarat



Rumah tangga miskin ini merupakan **kelompok rentan yang paling banyak menjadi sasaran penerima manfaat Bansos**, seperti PKH, Bansos Jabodetabek, Bansos Non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, Diskon listrik, BTNP dan BLT Dana Desa.

PEREMPUAN & ANAK



Bansos tunai untuk perempuan (ibu hamil) dan anak telah masuk dalam komponen PKH.

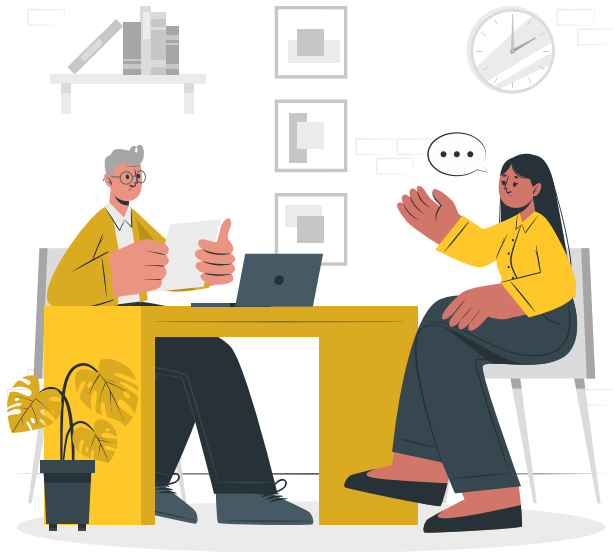
Bansos (barang) selama pandemi masih bersifat **netral gender**



Paket bantuan kebutuhan spesifik Perempuan dan Anak di DKI Jakarta yang diberikan Kementerian PPPA berupa **susu** untuk anak usia 3-4 tahun, makanan tambahan bergizi seperti **kacang hijau, biskuit, dan sereal**. Lalu kebutuhan perempuan remaja dan dewasa berupa **pembalut** serta **diapers** untuk anak.

LANSIA

Tingkat kemiskinan pada kelompok lansia (>65 tahun) pada tahun 2021 mencapai 13,15%. Realisasi itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,14% (Susenas, Maret 2021).



- Mulai tahun 2020, Kementerian Sosial RI meluncurkan **Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PROGRES LU)** yang terdiri dari 4 komponen:
- (1) Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (BANTU LU); **BANTU LU merupakan bantuan uang tunai** Rp. 2,4 juta/tahun atau Rp. 200 ribu/bulan
 - (2) Perawatan Sosial;
 - (3) Dukungan Keluarga; dan
 - (4) Terapi Sosial.

PENYANDANG DISABILITAS

Menurut data SUSENAS 2019, jumlah penyandang disabilitas mencapai 16 juta jiwa atau sekitar 9,7% dari jumlah penduduk Indonesia.



Program PKH memiliki target penyaluran terhadap disabilitas berat sampai dengan 150.000 orang per tahun. Realisasi menunjukkan baru sampai di angka 122.777 orang (2020) dan 113.163 orang (2021).

Jumlah Rp. 200 ribu/bulan atau Rp. 2,4 juta/tahun belumlah memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang biasanya 17% - 20 % lebih tinggi dibanding non penyandang disabilitas.



PENGUNGSI (BENCANA)

Per tanggal 21 Januari 2021, BNPB telah mencatat sebanyak 185 peristiwa bencana yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air



Bencana alam yang terjadi di masa Pandemi semakin memperberat tantangan penanganan kepada para korban.

Kementerian Sosial dan BNPB biasanya hadir dalam tiga fase penanganan bencana, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

PENGUNGSI (NEGARA LAIN)

Data menunjukkan setidaknya 82,4 juta orang di dunia melakukan perpindahan negara secara terpaksa (2020), dan angka tersebut memiliki tren yang terus meningkat.



sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967), sehingga Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi.

Pemerintah dan Pemda nampaknya masih akan terus mengalami kesulitan dalam memberikan Bansos yang tepat karena keterbatasan regulasi.

PENGANGGURAN & PREKARIAT

Skema Bansos selama pandemi yang fungsi dan tujuannya paling mendekati bagi kelas prekariat di Indonesia sejauh ini adalah **Kartu Pra Kerja**



Secilas, kartu pra kerja nampaknya bisa menjadi alat pemerintah untuk menekan beban para pengangguran terdidik ini dan memberikan alternatif peningkatan kompetensi melalui akses pada pelatihan

Temuan BPK pada semester II tahun 2021 mengindikasikan bahwa Rp. 289,85 Milyar insentif Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada 119.494 orang tidak tepat sasaran (karena peserta memiliki gaji diatas Rp. 3,5 juta/bulan)

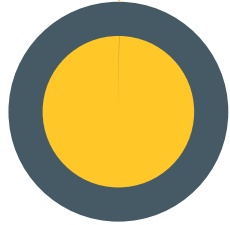


05.

**PERAN ORGANISASI
MASYARAKAT SIPIL
(OMS)**

Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna dalam Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

EMPAT PERAN CSO



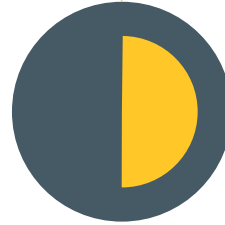
**KATALISASI
PERUBAHAN
SISTEM**

Menjadi mitra Pemerintah dalam menyusun *road map* Bansos yang lebih akuntabel, transparan, dan adaptif.

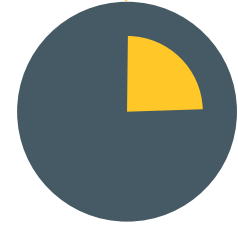


**MEMONITOR PELAKSANAAN
SISTEM & PENYELENGGARAAN
NEGARA**

Mengawal, mengawasi, dan mengontrol distribusi Bansos



**MEMFASILITASI
REKONSILIASI WARGA
NEGARA**



**IMPLEMENTASI
PROGRAM LAYANAN**

Menjadi fasilitator distribusi bantuan sosial



06.

KESIMPULAN

KESIMPULAN

- Pandemi COVID-19 telah menunjukkan dampaknya pada semua lapisan masyarakat meski dengan derajat yang berbeda-beda.
- Negara telah mencoba hadir melalui Bansos, sayangnya penyaluran Bansos belum efektif dan berpotensi merugikan negara hingga Rp. 6,93 Triliun.
- Pemerintah nampaknya belum memiliki peta jalan yang komprehensif terkait dengan Bansos bagi kelompok rentan (tidak ada acuan khusus kapan Bansos akan diberikan dan kapan akan dihentikan?).
- Selama Pandemi, terjadi pergeseran pemahaman tentang kerentanan yang biasanya bersifat khusus pada kelompok tertentu, menjadi kerentanan pada semua (universal).

KESIMPULAN (CONT.)

- Ragam Bansos masih terfragmentasi di banyak K/L dengan sinkronisasi, harmonisasi dan akurasi data yang masih sangat lemah. Pemerintah harus mengambil jalan tegas untuk memastikan proyek Satu Data Indonesia (SDI) dapat dipercepat.
- Kemensos perlu berkoordinasi dengan Kemendagri agar Pemda dapat segera melakukan pembaharuan DTKS sesuai dengan yang diharapkan/ditargetkan.
- Pemutakhiran DTKS perlu di dorong menjadi bagian dari kegiatan rutin di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam pendataan.
- Perlu regulasi yang tegas dan memadai untuk memberikan mandat kepada produsen data dari tingkat pusat hingga daerah dengan prinsip dan standar yang sama sehingga tidak terjadi tumpang tindih produksi data.

KESIMPULAN (CONT.)

- Sosialisasi terhadap program Bansos perlu ditingkatkan sembari mengurangi frekuensi pergantian nama program yang terlalu sering.
- Pemerintah perlu mengurangi Bansos yang bersifat barang dan memperbanyak Bansos dalam bentuk uang tunai. Jika dalam bentuk barang, Bansos tidak boleh netral gender.
- Peran aparat penegak hukum dalam pencegahan korupsi dan penegakan hukum perlu ditingkatkan, termasuk di dalamnya melibatkan pengawasan KPK/BPKP/Kejaksaan dalam mitigasi Korupsi dan upaya manipulasi untuk kepentingan politik.

TERIMA KASIH

